

---

## **Menganalisis Perjuangan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Merawat Demokrasi Indonesia**

Dwi Ayu Suetha <sup>a,1\*</sup>, Anny Wahyudi <sup>b</sup>, Budi Purnomo <sup>c</sup>

<sup>a b c</sup> Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

<sup>1</sup> [Suethaayu@gmail.com](mailto:Suethaayu@gmail.com);

\* Corresponding author

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perjuangan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Merawat Demokrasi di Indonesia. Selama masa kepemimpinan banyak kebijakan dan perundang-undangan yang dibuat untuk mendorong dan mengembangkan Indonesia ke arah yang lebih baik, baik itu secara ekonomi, budaya maupun politik yang salah satunya berhubungan dengan demokrasi yang berlangsung. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode historis atau metode sejarah dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjuangan SBY dalam merawat demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama masa kepemimpinannya, SBY berusaha membangun pemerintahan yang kuat, transparan dan akuntabel. Pemerintahan dirancang harus dapat merespon aspirasi rakyat menjadi program yang terealisasi. Pemerintahan dibuat seterbuka mungkin dan menyatu dengan lingkungan masyarakat luas.

**Kata Kunci: Perjuangan; SBY; Demokrasi Indonesia.**

### **Abstract**

*This study aims to analyze the struggle of Susilo Bambang Yudhoyono in Caring for Democracy in Indonesia. During his leadership, many policies and regulations were made to encourage and develop Indonesia towards a better direction, both economically, culturally and politically, one of which was related to ongoing democracy. This research is a qualitative research using the historical method or the historical method with a literature study approach, this study aims to analyze the struggle of SBY in maintaining democracy that took place in Indonesia. The results of the analysis show that during his leadership period, SBY tried to build a strong, transparent and accountable government. The government is designed to be able to respond to the aspirations of the people into a realized program. The government is made as open as possible and integrated with the wider community.*

**Keywords: Struggle; SBY; Indonesian Democracy.**

## **PENDAHULUAN**

Sejak Indonesia merdeka, berbagai system pemerintahan sudah diterapkan di negeri ini, mulai dari system presidensial hingga parlementer. Dari beberapa kali pergantian tersebut, setelah runtuhnya Orde Baru dan proses transisi beberapa presiden, akhirnya Indonesia melaksanakan pemilihan umum secara

langsung pada tahun 2004, yang menjadi pondasi sistem pemerintahan demokrasi yang ada hingga hari ini. Walaupun masih banyak kekurangan dan tantangan, namun beberapa Sebagian besar rakyat Indonesia merasa system pemerintahan demokrasi yang ada pada saat ini sudah lebih baik dari system-sistem yang ada sebelumnya. Salah satu hal yang dapat dirasakan adalah kebebasan pers telah menduduki ruang yang sebebaskan-bebasnya hingga setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing-masing.

Demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos* yang memiliki arti bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat dimana pemerintah (Presiden ) ditunjuk atau dipilih langsung dari para wakil rakyat, oleh karena itu pemerintahan tertinggi berada dari tangan rakyat. Demokrasi dikembangkan untuk memenuhi partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Demokrasi sendiri mencakup kondisi sosial, ekonomi dan juga budaya yang memungkinkan adanya kebebasan politik dan kesetaraan. Demokrasi Indonesia sendiri perlu dilihat dan disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Namun menjaga dan merawat demokrasi dalam negara tidaklah mudah. Karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, agar letak politik demokrasi negara tetap berada pada posisinya, yang sesuai dengan nilai-nilai dan aturan hukum demokrasi.

Seorang tokoh lahir krena momentum, tetapi juga banyak karena sikap, pemikiran dan gagasan-gagasannya, namun ada juga yang lahir dari proses dan rektrumen kepemimpinan. Tetapi banyak tokoh yang nasional yang lahir karena memenuhi salah satu dari ketiga aspek tersebut, namun ada juga yang lahir karena ketiga aspek tersebut, lain halnya dengan tokoh ini, meskipun belum mencapai puncak kursi kepresidenan tetapi telah memenuhi ketiga aspek tersebut, tokoh itu tak lain adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih kita kenal dengan SBY.

SBY adalah seorang tokoh yang ikut mendorong dan mengelola reformasi, SBY merasa banyak hal yang telah dicapai oleh bangsa ini, namun ada juga beberapa hal yang harus dibenahi, agar reformasi yang telah berjalan selama enam tahun berada pada tempat yang benar. Sebagai seorang Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), beliau merasakan reformasi tahap pertama yaitu tahun 1998-2004 semangat bangsa saat menghadapi demokrasi sangatlah membara, namun didalam proses itu tidak jarang menimbulkan beberapa hal yang kurang sesuai dengan semngat demokrasi. Tetapi, hal tersebut tidak boleh berlangsung secara berlarut-larut. Tahun 2004 SBY diberi kesempatan untuk melakukan evaluasi, refleksi dan koreksi, karena terpilih secara demokrati sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat. Untuk mengetahui sejauh mana reformasi ini berjalan dan bagaimana merumuskan langkah kedepannya, penelitian ini akan menjabarkannya lebih lanjut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode histori atau metode sejarah dengan pendekatan studi pustaka. Terdapat 4 langkah dalam sebuah penelitian sejarah yaitu, Heuristik, Kritik Sumber atau ferifikasi, dan interpretasi (Mulyana, 2004:145). Sebagai langkah awal dalam

sebuah penelitian ini yaitu pengumpulan sumber yang berkaitan dengan judul yang ditulis yaitu “Menganalisis Perjuangan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Merawat Demokrasi di Indonesia”, sumber yang peneliti dapatkan dari Buku-Buku, Artikel-artikel dan Jurnal yang berkaitan dengan judul yang peneliti buat, langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah kritik sumber dan interpretasi dimana pada tahap ini penulis menggunakan data-data dengan sumber yang, peneliti juga melakukan penafsiran terhadap data yang terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan tokoh yang dikaji, mulai dari analisis sistem pemerintahan era SBY sampai dengan pemerintahan SBY dan politik luar negeri Indonesia. Kemudian langkah terakhir yaitu histografi yaitu menulis hasil dari penelitian yang dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Biografi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)**

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden Republik Indonesia ke enam dan merupakan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Bersama wakil presiden Drs. M. Jusuf Kalla, SBY terpilih sebagai presiden pada tahun 2004 yang mengusung agenda “Indonesia yang lebih adil, damai, sejahtera dan demokratis”. SBY juga menghabiskan dua periode masa pemerintahan, karena kemudian pada tanggal 20 oktober 2009, Susilo Bambang Yudhoyono dilantik Kembali sebagai presiden RI periode 2009-2014 dengan wakil presiden Prof. Dr. Boediono.

Susilo Bambang Yudhoyono atau sering disebut dengan SBY, lahir pada 9 september 1949 di Pacitan, Jawa Timur. SBY merupakan seorang ilmuwan teruji, dimana beliau merai gelar Master Management dari Webster University di Amerika Serikat pada tahun 1991 dan setelah itu melanjutkan studinya di Institut Pertanian Bogor dan pada tahun 2004 merai gelar Doktor Ekonomi Pertanian dan pada tahun 2005 SBY mendapatkan anugrah Doctor Honoris Causa.

SBY merupakan seorang yang berhasil menjadi lulusan terbaik di AKABRI Darat pada tahun 1973 dan mengabdikan sebagai perwira TNI selama 27 tahun. SBY sendiri telah merai pangkat Jendral TNI pada tahun 2000. SBY telah melakukan perjalanan yang cukup panjang dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan di Indonesia dan juga luar negeri, seperti Seskoad. SBY sendiri pernah menjadi Command and General Staff Collage di Amerika Serikat. Pada saat penugasan militer SBY menjadi Komandan Pasukan dan Teritorial, Perwira Staf, pelatihan dan dosen pada daerah operasi ataupun markas besar. SBY juga pernah ditugaskan di Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad, Panglima Kodam Sriwijaya dan Kepala Staf Teritorial TNI.

Selain di Indonesia, SBY juga pernah bekerja pada misi-misi luar negeri, yaitu ketika menjadi *Chief Military Observer United Nation Peace Keeping Operations (CMO UNPKO)* dan Kontingen Indonesia di Bosnia Herzegovina pada tahun (1995-1996). Selesai nya mengabdikan sebagai perwira TNI selama 27 tahun, SBY mendapatkan masa pensiun menjadi lebih awal yaitu 5 tahun ketika sedang menjabat menteri pada tahun 2000. Karena pengabdian nya SBY mendapatkan 24 tanda penghormatan dan bintang jasa, yaitu Lencana PBB UNPKF, Bintang Darma dan Bintang Maha Putra Adipurna.

Penghargaan tersebut diberikan atas jasa-jasa melebihi panggilan tugas, SBY merupakan orang yang mendapatkan Bintang Jasa tertinggi di Indonesia yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna.

Kemudia sebelum dipilih rakyat dalam sebuah pemilihan presiden secara langsung, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pernah melaksanakan tugas-tugas dalam pemerintahan, salah satunya sebagai Menteri Pertambangan dan Energi serta Menteri Koordinator politik, sosial dan keamanan (Polhukam) pada kabinet persatuan Nasional pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. SBY juga sebagai Menteri Politik dan Keamanan dalam kabinet gotong-royong dimasa Presiden Megawati, ketika menduduki sebagai menteri koordinasi SBY dikenal dunia internasional karena memimpin Indonesia dalam memerangi terorisme.

SBY dikenal aktif dalam beberapa organisasi masyarakat. SBY pernah menjabat sebagai *Co-Chairman of the Governing Board of the Patnership for the Governace Reform*, yaitu upaya bersama Indonesia dan organisasi berupaya meningkatkan pemerintahan di Indonesia. Dimana SBY sebagai ketua dewan pembinaan di Brighten, sebuah lembaga yang membahas kajian teori dan praktik pembangunan nasional.

Dilihat dari beberapa tahun trakhir, SBY pernah berperan aktif disebuah forum Internasional, dalam rangka menyelamatkan lingkungan hidup, yang dilaksanakan konferensi Bali mengenai perubahan iklim tahun 2007 yang menghasilkan *Bali Road Map*. SBY juga memprakasai terbentuknya *Coral Triangle Intiative*, yaitu upaya kerjasama antara Indonesia, Malasyasia, Philipina, Papua Nugini, dan Brunai Darussalam dalam rangka melindungi keanekaragaman terbentuknya Forest-11 atau F-11 yaitu kelompok negara yang mempunyai hutan tropis didunia.

SBY merupakan seorang yang senang membaca dan mempunyai belasan ribu buku, selain itu SBY sudah banyak menulis beberapa buku dan artikel seperti: *Transformong Indonesia: Selected Internasional Speeches* (2005), *Make of a hero* (2005) dan *Taman Kehidupan*, yaitu sebuah antropologi yang telah tulis pada tahun 2004. SBY merupakan seorang penulis yang fasih berbahasa Inggris. SBY sendiri merupakan muslim yang sangat taat, SBY menikah dengan Ani Herrawati dan dikaruniai dua orang putra. Yang pertama Kapten Inf. Agus Harimurti Yudhoyono dan yang Kedua, Edie Baskoro Yudhoyono.

## **B. Perjuangan SBY dalam Merawat Demokrasi Indonesia**

### **1. Awal Karir Kabinet**

Pada saat presiden Soeharto mendirikan sebuah kabinet pembangunan VII, pada bulan Maret 1998. SBY menjadi salah satu nominasi yang akan menduduki menteri penerangan, dimana Jendral berbintang dua ini pada saat itu masih menjabat Asisten Sosial dan Politik (Asosspol) Kassospol ABRI dan usianya baru memijak 47 tahun dan pada saat presiden Habibie muncul mewakili Soeharto pada mei 1998. Nama SBY juga menjadi calon untuk menduduki Menteri dalam negeri bersama dengan seniornya dan atas kemauan presiden Abdurrahman wahid SBY diangkat menjadi menteri Pertambangan dan Energi.

Ketik presiden Abdurrahman Wahid melantik Kabinet Persatuan Nasional pada Oktober 1999. SBY menjadi salah satu didalamnya, SBY sendiri dipercayai untuk menjadi mentan dimana tugas yang baru yang belum sama sekali SBY sentuh. Jabatan ini pun diserahkan dari pejabat lama yaitu Kuntoro Mangunbroto kepada Susilo Bambang Yudhoyono.

Untuk menghadapi tugasnya yang baru SBY harus terpacu dengan waktu, hal ini karena tantangan yang dihadapi jajaran pertambangan cukup kompleks, karena SBY harus menyesuaikan dengan ritme pekerjaannya yang baru. SBY sangat menyadari sebagai seorang militer yang mana tidak mempunyai latar belakang dibidang pertambangan sangat banyak sekali hal yang harus SBY pelajari mengenai hal-hal yang bersifat pertambangan supaya SBY dapat memberi inspirasi dan motivasi dalam mendorong departemen dan meningkatkan kinerja.

Sesuai dengan tuntutan reformasi, ada tiga misi yang di emban dalam pembangunan sektor pertambangan, yang pertama, pemberdayaan kerakyatan berbasis SDM (Sumber Daya Manusia) dalam hal ini dapat memberikan indikasi usaha disektor pertambangan dan energy yang harus memperdayakan seluruh komponen masyarakat, baik pengusaha ataupun koperasi. Kedua, membentuk pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Dalam hal ini aparat harus senantiasa bersih, transparan, dan menjauhkan hal-hal yang berbau kolusi, korupsi dan nepotisme. Ketiga, pradigma pemerintah daerah, dimana departemen pertambangan dan energy akan mendelegasikan kewenangan dibidang pertambangan dan energy pada pemerintah daerah secara bertahap.

Misi-misi yang telah direncanakan kemudian menjadi landasan bagi SBY untuk memimpin sebuah departemen yang mana mempunyai peran yang strategis di negeri ini. Misi inilah yang menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam mewujudkan pembangunan di sektor pertambangan dan energi secara demokratis dan dapat berdaya saing tinggi. SBY merupakan orang yang dikenal baru dalam bidang pertambangan, namun awal kehadiran SBY di Departemen Pertambangan ini memberikan warna baru, karena SBY sendiri merupakan seorang militer yang mempunyai kedisiplinan yang cukup tinggi. SBY dapat menyesuaikan terhadap kinerja pegawai negara dan tidak membuatnya menerapkan kultur militer yang kaku.

Jajaran departemen pertambangan merakan bahwa SBY memiliki jiwa *leadership* yang kuat, yang mana dapat menerapkan *Human relations* yang tinggi, sehingga hubungan antara atasan dan bawahan tercipta secara dinamis. Hal ini tercipta karena untuk mengakrabkan hubungan didalam lingkungan kerja SBY tidak terlalu bersikap formalitas. SBY merupakan orang yang termasuk cepat dalam menyesuaikan dengan bidang tugasnya, hal itu dirasakan sendiri para staffnya, ketika pertama kali memulai tugasnya sebagai menteri pertambangan dan energi SBY harus mendatangi sejumlah acara penting seperti konferensi yang bersifat Nasional maupun internasional yang mana dihadiri oleh eksekutif asing dari berbagai perusahaan.

Pada saat sidang OPEC yang dilaksanakan di Wina, Australia. SBY mampu membawakan diri sebagai menteri pertambangan yang cukup moderat hingga bisa menjadi penengah, karena yang

kita ketahui OPEC memiliki dua kelompok yang berbeda pandangan dan kepentingan. Kelompok pertama yaitu Saudi Arabia, Kuwait dan Qatar mempunyai cadangan minyak yang berlimpah mengingat untuk memproduksi minyak sebanyak-banyaknya agar harga minyak dipasaran dunia tidak terlalu tinggi dapat membuat dampak negatif bagi industri minyak dalam jangka yang cukup panjang, sementara kelompok kedua terdiri dari Irak, Aljazair dan Libya mempunyai cadangan minyak yang tidak terlalu banyak sehingga menginginkan produksi rendah untuk merangsang di pasar dunia, karena bagi mereka minyak merupakan penyumbang devisa bagi negara.

Sementara Indonesia sendiri terletak pada posisi negara yang menginginkan produksi minyak yang rendah agar dapat merangsang harga dipasar dunia. Indonesi selalu *reasonable*, tidak mau terperosok dalam tarik menarik oleh dua kubu ekstrim tersebut. Dalam sidang OPEC SBY mendapatkan tempat yang cukup baik, dimana SBY memainkan peran untuk membangun konsensus dan mencairkan kebekuan. Sebuah peran yang dimainkan SBY secara cantik ketika mengawali karirnya sebagai Mentabes. Persoalan semacam ini merupakan hal yang tidak mudah apalagi SBY bukan seorang menteri yang mempunyai latar belakang di bidang pertambangan. SBY mempunyai speed yang sangat cepat melakukan adaptasi meski tidak mempunyai latar belakang dibidang pertambangan tetapi SBY mampu memainkan peran yang terbilang cukup strategis.

Belum sampai satu bulan menjadi seorang menteri pertambangan dan energi, SBY mendapat sebuah mandat dari presiden Abdurrahman Wahid untuk melakukan kunjungan misi ke negara Irak. Di negeri Saddam Hussein, SBY mengemban sebuah misi mencari peluang usaha yang berkaitan dengan *oil for food* karena sejak Irak menginvasi Kuwait pada tahun 1999, PBB mengembargo negeri Seribu Satu Malam. Untuk membantu masyarakat Irak PBB kemudian memberlakukan kebijakan *oil for food* di Irak, yang tujuannya adalah agar Irak bisa mengekspor minyak secara terbatas untuk dapat membeli makanan dan obat-obatan bagi rakyatnya.

Dalam kaitan dengan *oil for food*, Indonesia telah mengekspor bahan pangan dan obat-obatan ke negerinya Saddam Husein, dilain pihak Indonesia tidak pernah mendapatkan minyak dari Irak, padahal minyak Irak relatif cukup bagus dan harganya cukup tinggi di pasar internasional. Jika Indonesia mendapatkan minyak dari Irak, Indonesia bisa mengelolah dan menjualnya kembali ke pasar internasional agar bisa menambah devisa negara.

Selama berada di irak, SBY melakukan negosiasi dengan menteri perminyakan Irak, supaya Indonesia bisa mendapatkan jatah minyak irak yang dijual untuk membeli bahan makanan dan obat-obatan. Sebagai wakil pemerintah SBY menjadi fasilitator agar para pengusaha Indonesia supaya dapat mengakses impor minyak dengan meningkatkan volume ekspor bahan pangan dan obat-obatan. Sedangkan berkaitan dengan Pertamina, SBY memperjuangkan agar usaha milik pemerintah bisa mendapatkan nonblok (Konsensi Wilayah Kerja) di negeri tersebut.

## **2. Kenaikan TDL dan BBM**

Sebagai menteri yang berugas di pertambangan dan energi, pada awal perbaikan, bidang tugas yang di emban SBY ternyata memegang hal-hal yang sangat pekat didalam masyarakat. Ketika pemerintah menghadapi kesulitan dalam memperkirakan akibat krisis ekonomi, maka pemerintah memberhentikan berbagai macam bentuk subsidi. Termasuk subsidi tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi kewenangan departemen teknis, yaitu Departemen Pertambangan dan Energi. SBY sebagai menteri pertambangan dan energi dan sebagai penanggung jawab dibidang pertambangan dan energy SBY tidak boleh menyerah menghadapi keputusan pemerintah ini tidak populer dan akan mendapatkan perlawanan dari masyarakat, karena hal itu harus dilakukan jika rakyat ingin keluar dari kerisis.

SBY sebagai seorang menteri yang pemimpin yang harus mengambil keputusan untuk melakukan sosialisasi mengenai kenaikan BBM dan TDL dengan membentuk tim sosialisasi TDL dan BBM agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengapa subsidi harus dicabut serta berbagai upaya yang akan dilakukan pemerintah. Kemudian pada era reformasi SBY menjadi pionir dalam melakukan sosialisasi kepada kebijakan publik, SBY merupakan menteri yang pertama kali melakukan kebijakan public secara program dan terarah secara sistematis. Sehingga mengenai kebijakan kenaikan TDL dan BBM tidak hanya DPR yang memberi keritik, pandangan dan usulan melainkan seluruh masyarakat.

Serta upaya SBY dalam mensosialisasikan pencabutan subsidi BBM, menangkap tuntutan rakyat dimana pertamina menjadi peran utama dalam pengelola BBM dan sebagai menteri yang memahami betul aspirasi masyarakat dengan memanfaatkan momentum ini untuk mendorong pertamina melakukan rekontruksi. Dimana untuk mendorong pertamina melakukan rekontruksi pada saat serah trima jabatan Direktur Utama Pertamina dari Martiono Hadiano kepada pejabat baru yaitu Baihaki Hakim pada 1 Maret 2000. Cara SBY memanfaatkan momentum tersebut dengan membangkitkan semangat jajaran BUMN dengan khusus SBY meminta kepada Baihaki dalam waktu tiga bulan bisa menyiapkan cetak biru pertamina.

Sebagai seorang menteri yang mempunyai tanggung jawab dalam mendorong pembangunan pertambangan dan energi yang denokratis serta berdaya saing tinggi. SBY memerlukan perangkat UU yang lebih kondusif terhadap tuntutan reformasi. Setelah beberapa dekade sejak diberlakukannya PP. No 44 tahun 1960, mengenai pertambangan minyak dan gas bumi dan UU No. 8 Tahun 1971, tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara dalam pelaksanaannya terdapat kendala. Dimana subsidi kedua UU ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dimasa yang akan datang. Karena dalam mendorong kebutuhan dan tantangan yang mendunia, kegiatan minyak dan gas diminta agar lebih mampu mendukung kelangsungan pembangunan nasional dalam pengembangan kedamaian dan ketentraman rakyat.

Seiring mengenai kebijakan pemerintah mengenai subsidi BBM, SBY juga mengalami permasalahan mengenai Stok BBM harus diberikan perhatian penuh supaya tidak mengalami

kesulitan stok agar tidak berubah menjadi krisis dan bekerja keras dengan Pertamina agar terus melakukan upaya antisipasi. Banyak sekali faktor yang memicu krisis BBM sebelum pemerintah membatalkan kenaikan BBM pada April tahun 2000, muncul lah masalah mengenai pengoplosan dan penyeludupan BBM. SBY pun memberikan perhatian penuh dalam mengatasi masalah ini dengan membentuk tim terpadu, jika pengoplosan dan penyeludupan ini dibiarkan akan membuat negara rugi dan kehilangan stok nasional.

SBY merasa sangat khawatir karena mengatasi penyeludupan dan pengoplosan di perkirakan akan selesai dalam satu bulan namun ketika para engineering melakukan perawatan menemukan beberapa unit mengalami kerusakan berat dan perbaikan menjadi molor selama tiga bulan. Kondisi ini membuat SBY mulai mengkoordinasi dengan Pertamina untuk mengatasi masalah suplai tersebut. Langkah koordinasi ini harus bisa mengatasi suplai hingga pertengahan Juni. Tetapi ditengah kerja keras tersebut pada Juni terjadi kebakaran kilang *Al-Achmadi* di Kuwait. Masalahnya menurut SBY pada saat kilang Kuwait terbakar, di Amerika utara sedang mengalami musim panas yang membuat penduduk Amerika Utara berpergian sehingga kebutuhan premium meningkat, sedangkan untuk mengatasi lonjakan permintaan premium mereka membeli minyak tiga bulan sebelumnya. Kondisi inilah yang membuat Indonesia tidak mudah mencari jalan karena banyak negara penghasil minyak sudah terikat dengan komitmen dengan negeri Paman Sam.

SBY harus bekerja keras mengatasi masalah kelangkaan stok BBM, karena kebijakan stok BBM secara nasional mengalami perubahan, sebelum krisis stok BBM secara Nasional masih cukup untuk 23 hari, karena setelah krisis kebijakan tersebut di evaluasi, *Price Water House* (PWC) misalnya mengajurkan stok BBM itu cukup 17 hari sehingga sedikit moderat. Untuk mengatasi kelangkaan pasokan BBM, SBY memerintahkan Pertamina untuk melakukan impor dari luar negeri, tidak perlu untung, rugi, yang terpenting masyarakat bisa mendapatkan BBM mudah, Singapura biasanya bisa mengalirkan BBM ke Indonesia, namun kali ini tampaknya susah untuk mengalirkan BBM ke Indonesia.

Akibat berbagai faktor yang saling menyusul SBY memutuskan minyak dari kilang Cilacap dan Balikpapan yang awalnya untuk memasok kawasan Indonesia tengah dan timur, terpaksa sebagian harus dibelokkan kearah barat, untuk mengisi kekosongan di Balongan. Sebagai penanggung jawab tertinggi di departemen pertambangan, SBY membentuk prioritas mana daerah yang tidak boleh mengalami krisis BBM. Jakarta menjadi salah satu pusat yang tidak boleh mengalami krisis BBM. Langkah ini bukan untuk mengesampingkan beberapa daerah, tetapi merupakan cara untuk mengatasi krisis BBM di berbagai daerah.

### **C. Menuju Indonesia Baru**

Memasuki abad ke-21, Indonesia mengalami kegoncangan dimana menyusul lengsernya presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan, seakan negeri ini mengalami diskontinuitas, karena rakyat mengalami ketidak pastian dan kemudian muncul gerakan “pembebasan” yaitu munculnya wacana



baru, yaitu mendekonstruksi Indonesia masa lampau dan kemudian membangunnya kembali menjadi Indonesia baru yang di dambakan bersama.

Dalam membangun Indonesia yang baru tentu tidak melepaskan Indonesia masa lalu, walaupun masa lalu itu tidak mengenakan. Untuk membangun Indonesia baru harus berdasarkan pada ideologi dan cita-cita nasional yang telah ditetapkan oleh pendiri negeri, seperti halnya di negara Amerika dan Eropa nilai-nilai karakter kebangsaan diletakkan pada warisan suci yang menjiwai dan menafasi perjalanan bangsa. Dengan diletakkannya nilai tersebut diharapkan dapat menembus tantangan-tantangan generasi demi generasi.

Belajar dari negara-negara besar ini lah SBY merasa risau, karena ketika menyaksikan di era reformasi, seolah-olah alergi dan tidak ingin membicarakan dan berdialog mengenai cita-cita nasional, karena warisan orde baru menganggap kata-kata seperti kepentingan nasional, pembangunan, dan stabilitas dianggap sebagai jagoan rezim lama yang harus dikubur dalam-dalam. Karena secara jujur SBY mengakui dimasa lampau ada beberapa hal manipulasi dan politisasi terhadap makna dan ideologi pancasila, serta UUD 1945. Untuk membangun Indonesia baru, SBY melihat bangsa ini perlu mengangkat dan menyegarkan kembali cita-cita dan tujuan nasional. Karena konstitusi telah meletakkan cita-cita kita sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.

Untuk membangun indoneisa baru, SBY melihat bangsa ini harus bertumpu pada tiga nilai kebangsaan yaitu cita-cita, dasar negara dan tujuan nasional. Agar setiap generasi yang melangkah besar harus mendasarkan pada nilai kebangsaan jika tidak ingin kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia, termasuk dalam merekonstruksi Indoneisa yang lama dan membangun Indonesia yang baru. SBY melihat kembali tugas generasi abad ke-21 harus berjuang mewujudkan Indonesia yang stabil. Demokratis dan sejahtera. Jika ingin menghadirkan nilai-nilai kebangsaan, ketentraman dan kebangsaan yang mana menjadi ukuran masyarakat global, ketika ingin membangun masyarakat yang baik, ekomoni, politik yang baik juga.

Demokrasi yang baik sebagaimana rumusan Liz dan Stepan tentu sangat relevan dikembangkan di Indonesia walaupun mempunyai tantangan yang cukup besar, hal itu harus menjadi agenda nasional utama dimasa yang akan datang. Indonesia dimasa mendatang harus bisa membangun demokrasi yang sejati, disamping tumbuhnya stabilitas dan ekonomi yang baik.

SBY mencoba merumuskan Indonesia baru yang dapat dikembangkan dan dibangun paling tidak memiliki kondisi yang ideal seperti: pertama, Sistem dan institusi kenegaraan dan kemasyarakatan yang telah berada pada posisi yang mapan. kedua, penyimpanan dalam konsepsi, tatanan dan praktek kebangsaan yang dicita-citakan negara proklamasi 1945 dapat dihilangkan dan diluruskan kembali. Ketiga, Indonesia mampu tampil dalam percaturan global secara terhormat, kontribusi dan berdaya saing sesuai nilai-nilai kebangsaan. Keempat, Indonesia semakin maju, mandiri, aman, adil dan makmur. Kelima. Sembilan pilar negara semakin tegak, membumi dan teraplikasi secara luas dalam sendi kehidupan.

SBY menyadari, Kriteria Indonesia baru yang diajukan itu sangatlah ideal, bahkan dianggap sebagai utopia yang sulit menjadi kenyataan, tetapi SBY mengingatkan harus menjadi bangsa yang besar dan harus berfikir besar serta mau pula berkarya besar. Kondisi ini menjadi tugas setiap generasi yang akan datang dalam mewujudkannya. Tetapi SBY juga melihat salah satu tugas besar abad ke-21 adalah menghidupkan kesadaran bersama agar dapat melanjutkan pembangunan bangsa yang memiliki nilai karakter jati diri yang baik, terutama dari segi masyarakat, SBY memforumkan bangsa ini harus bisa membangun masyarakat yang sipil dan madani. Yaitu masyarakat yang lebih berdaya dan diberdayakan agar dapat mengatur kehidupan sendiri.

Dalam jangka pendek dan menengah, titik berat sebuah reformasi harus berada pada bidang hukum, ekonomi dan politik. Dibidang hukum, yang harus di adakan adalah keadilan, ketentraman, kepatian dan ketertiban umum. Dan perangkat hukum harus dikemas dan ditegakkan dan diskriminasi hukum harus di hentikan. Selanjutnya pada bidang ekonomi, bangsa harus menuju pada terbangunnya kehidupan ekonomi nasional yang adil, stabil, namun tetap tumbuh dan merata. Kinerja mikro ekonomi dan fundamental harus dapat ditingkatkan kembali. Selanjutnya dibidang politik, reformasi diarahkan agar dapat mewujudkan masyarakat madani yang demokratis, yang mana pada format politik dikembangkan mencakup terbangunnya hubungan yang sehat dan sistematis antara lembaga negara, termasuk berlangsungnya check and balances antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Bersamaan dengan bergulirnya reformasi, SBY merasakan keran demokrasi mulai terbuka secara lebar, sehingga muncul kesan dimana Indonesia mulai menerapkan sistem demokrasi liberal. Indonesia mempunyai cerita tersendiri mengenai dinamika pasang surut demokrasi, bagi SBY, Indonesia yang pluralistik seras akan konflik karena kemajemukan yang ada. Dimana Indonesia mempunyai kemajemukan ideologi, konflik politik, konflik sosial harus mempunyai sistem yang benar-benar cocok. Memperaktikan demokrasi liberal, bahkan sangat liberal, pasti akan bertentangan dengan kondisi yang nyata bangsa ini. kembali lagi pada sistem otoritarian, yang mana membungkam kebebasan, hak asasi manusia dan demokrasi, akan menyimpan ledakan- ledakan yang baru dimasa yang akan datang.

SBY melihat, harus adanya kesinambungan antara demokrasi yang liberal dengan tatanan yang otoritatif meskipun bukan semi otoritarian. SBY perlu menganjurkan dibangunnya sistem dan model demokrasi yang disatu sisi, demokrasi, hak asasi manusia dan civil society yang harus terus dikembangkan. Disisi lain, stabilitas, keamanan dan tertib sosial juga harus dipertahankan. Dimana dibangun dan dikembangkan di negeri ini agar lebih dari sekedar norma-norma konvensional dari sebuah kehidupan demokrasi.

#### **D. Karakteristik Kepemimpinan SBY**

Susilo Bambang Yudhoyono atau sering disebut dengan SBY mempunyai karakter yang menjadikan beliau memiliki jiwa pemimpin bagi masyarakat ataupun dalam melaksanakan

tugas-tugasnya. Karena dalam mengambil atau memimpin SBY memegang prinsip setiap menyelesaikan konflik harus mengutamakan pendekatan mengajak ketetapan yang bersifat *Win-Win Solution*. Prinsip inilah yang dipegang untuk menjaga ke utuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu cara kepemimpinan SBY merupakan kepemimpinan yang cocok diterapkan di Indonesia, karena kepribadian SBY yang tegas, pemikir dan detail. Yang membuat dirinya teliti dalam menyelesaikan berbagai masalah dan setiap mengambil keputusan SBY mempunyai solusi. Dalam melaksanakan rapat terutama dalam hal memikir, dilihat pada saat pembentukan atau perancangan kabinet barunya SBY lebih memperhatikan para tamu malang yang berada diruang tamu dari pada menteri-menterinya yang menunggu wawancara.

Kemudian saat membuat suatu keputusan SBY merupakan sosok yang tegas karena SBY mempunyai pemikiran yang berkesinambungan dengan kalimat SBY yang berfokus pada misi untuk menyelamatkan rakyat bukan berpolitik. Dimana SBY pernah mengatakan bahwa kita harus berpikir terang, karena ini bukan perang, bukan pelatihan, bukan analisis. Bukan konflik. Bukan persaingan ataupun geopolitik. Selain itu, budaya kepemimpinan yang sangat sulit tumbuh dalam tubuh pemerintahan. Memperlihatkan kepemimpinan SBY yang tegas dimana SBY merancang sebuah program kreatif untuk menciptakan demokrasi secara langsung yang mana membuka akses bagi rakyat untuk rakyat agar saling berhubungan dengan presiden.

## **SIMPULAN**

Dari hasil pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono merupakan seorang tokoh pemimpin yang berkepribadian tegas, pemikir dan detail. Pada saat membuat suatu keputusan SBY merupakan sosok yang tegas karena SBY mempunyai pemikiran yang berkesinambungan dengan kalimat SBY yang berfokus pada misi untuk menyelamatkan rakyat bukan berpolitik. Dimana SBY pernah mengatakan bahwa kita harus berpikir terang, karena ini bukan perang, bukan pelatihan, bukan analisis dan bukan konflik ataupun juga bukan persaingan ataupun geopolitik. Karena dalam mengambil atau memimpin SBY memegang prinsip setiap menyelesaikan konflik harus mengutamakan pendekatan mengajak ketetapan yang bersifat *Win-Win Solution*. Prinsip inilah yang dipegang untuk menjaga ke utuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Eriyanto, 2002. Analisis Framing : Kontruksi Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta : LKiS  
Yogyakarta
- Hardi, Prasetyo, Buku Putih Departemen Pertambangan dan Energi Tahun 2000, (tt) Jakarta, 2000.
- Komisi Pemilihan Umum : Buku Evaluasi Pelanggaran dan Kecurangan Pemilihan Umum Tahun 1999, Jakarta, 2000.

Musajabe, Herman, Mayor Jendral, Tantangan Pembangunan: Dinamika Pemikiran Seskoas 1992-1993, Forum Pengkajian Seskoad, Bandung, 1993.

Mustofa, Kurdi dan A Yani Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono dalam 5 Hari Mandat Maklumat, Aksara Kurnia, Jakarta, 2003.

Nyak Baik, Ridwan. Refleksi Transformasi Pertamina Dalam Editorial Buletin Pertamina 1998-2004, Humas Korporat PT Pertamina (Persero), Jakarta, 2000.